

BAB VI

PENUTUP

1.1 Kesimpulan

Lembaga swadaya masyarakat adalah lembaga, baik nasional maupun internasional, yang keberadaannya terpisah dari pemerintah Negara dimana ia didirikan. Secara sederhana, LSM ini memiliki sifat dan tujuan pelayanan sosial kepada masyarakat. Tugas organisasi ini secara umum melayani kebutuhan orang banyak. Biasanya organisasi tidak mencari keuntungan, pekerjaan murni bersifat sosial.

Nurani perempuan merupakan salah satu LSM yang melakukan pemberdayaan politik perempuan yang didasari oleh kenyataan adanya ketidakadilan yang terjadi pada perempuan, perempuan adalah kelompok yang termarginalkan dalam dunia politik. Upaya yang dilakukan ini terhadap perempuan sangatlah penting untuk dilakukan dalam upaya untuk menciptakan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Dengan adanya kesetaraan ini maka perempuan akan memiliki akses untuk ikut berperan serta dalam kehidupan bernegara.

Pemberdayaan adalah suatu yang muncul dalam pendekatan pembangunan ketika masyarakat marginal memerlukan bantuan proses kegiatan ekonomi dan sosial dalam konteks kesejahteraan kehidupan masyarakat. Pemberdayaan politik perempuan yang dilakukan oleh Nurani Perempuan telah membantu dalam proses kegiatan politik. Pemberdayaan politik perempuan untuk memperkuat perempuan

dalam politik agar dapat merubah dan memperbaiki posisi mereka ketika berhadapan dengan kelompok yang kuat secara sosial dan politik. Inti dari pemberdayaan politik perempuan ini agar perempuan mempunyai posisi tawar sehingga menjadi proses pelaku pembangunan yang partisipatif dan aktif serta mampu mengangkat kebijakan yang berprespektif gender dan bukan hanya sebagai objek dari kebijakan. Dengan melakukan beberapa perannya seperti mengadakan seminar kursus strategi pemenangan calon anggota legislatif perempuan dan 10 agenda politik perempuan serta didukung dengan kegiatan lainnya seperti temu konstituen, radio talkshow dan pelatihan menjadi pemilih JITU dengan selalu mengangkat isu gender dalam setiap pembahasan dalam kegiatan yang dilakukan.

Secara tegas peneliti melihat bahwa pemberdayaan politik perempuan yang dilakukan nurani perempuan dalam bentuk edukasi dan dukungan moral kepada calon anggota legislatif perempuan dan pemilih perempuan dengan mengangkat isu-isu gender dengan tujuan atau konsep yang ingin dicapai nurani perempuan bahwa perempuan tidak lagi menjadi sasaran atau objek kebijakan tetapi perempuan langsung yang bersuaradan membuat kebijakan sesuai yang mereka butuhkan, sehingga nanti perempuan lah yang mendapatkan manfaatnya dari kebijakan yang telah dibuat.

Kekuatan politik tidak hanya sebatas bagaimana individu atau kelompok dapat bergerak dalam mengusulkan dan merubah kebijakan. Lebih dari itu kekuatan politik juga menyangkut bagaimana kelompok tersebut terhadap sistem,

baik itu formal maupun informal, yang cenderung mengikuti segala proses politik yang ada.

1.2 SARAN

dengan adanya penelitian ini, peneliti menyarankan agar Nurani Perempuan beserta pihak-pihak yang terkait LSM perempuan lainnya dan DPRD harus terus meningkatkan pengawasan dan pemantauan terhadap anggota legislatif perempuan yang terpilih.

Untuk kedepannya peneliti juga menyarankan kepada lembaga atau kelompok kepentingan lainnya agar bisa berpartisipasi dalam pemberdayaan politik perempuan atau ikut berperan serta dalam memberikan masukan kepada anggota legislatif perempuan agar bisa membuat kebijakan yang berprespektif gender.

Nurani Perempuan sebagai LSM yang ikut mengambil peran dalam peningkatan politik perempuan semoga bisa menjadi acuan dan contoh bagi LSM lainnya yang ingin meningkatkan kaum perempuan dalam politik dan kesetaraan antara perempuan dan laki-laki juga.

Peneliti menyarankan agar penelitian tentang lembaga-lembaga non pemerintahan atau kelompok kepentingan yang ada di daerah terus dilakukan untuk mempertambah khazanah ilmu pengetahuan baik pada tingkat kabupaten/kota, provinsi dan nasional maupun tingkat internasional. Untuk penelitian selanjutnya, peneliti menyarankan agar dilakukan cara observasi dalam teknik pengumpulan data. Observasi atau pengamatan yang mendalam perihal kekuatan politik yang ada di suatu kelompok kepentingan dalam mempengaruhi sistem politik yang ada di

pemerintahan dan mampu menjawab proses penguatan peran lembaga dalam pemerintahan.

